

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAMBI**

Jl. R.M.Nur Admadibrata No. 04 Jambi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Program/Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Jambi, Januari 2023

KEPALA BADAN

H. MUKTI, SE. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami, laporan tersebut telah dilakukan Review oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Januari 2023
Pengguna Anggaran

H. MUKTI, SE, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 197011121999031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Satuan Kerja tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2022 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 19.211.662.651,- atau mencapai 99 % dari anggarannya Rp. 19.581.188.125,-

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2022 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset lancar per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0.00,-.

Jumlah kewajiban jangka pendek per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,-

Jumlah ekuitas dana lancar per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,-.

Jumlah ekuitas dana dalam investasi per 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.725.238.123,87,-

Jumlah aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.725.238.123,87,-

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.725.238.123,87

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	19.581.188.125,00	19.215.662.643,00	98,13	13.537.411.507,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	19.233.024.152,00	18.868.763.093,00	98,11	13.413.955.507,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.842.212.856,00	7.508.759.433,00	95,75	6.821.433.243,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.294.582.296,00	6.263.774.660,00	99,51	4.487.752.264,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	5.096.229.000,00	5.096.229.000,00	100,00	2.104.770.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	348.163.973,00	346.899.550,00	99,64	123.456.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.214.073,00	123.211.500,00	100,00	123.456.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.776.000,00	99,70	0,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	149.949.900,00	148.912.050,00	99,31	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(19.581.188.125,00)	(19.215.662.643,00)	98,13	(13.537.411.507,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(19.581.188.125,00)	(19.215.662.643,00)	98,13	(13.537.411.507,00)

Jambi, 1 Januari 2022
Pengguna Anggaran

H. MUKTI, SE. ME
NIP. 197011121999031002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 12		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik	
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
KD. REK	URAIAN	2022	2021
1	ASET		
1 . 1	ASET LANCAR		
1 . 1 . 1	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
1 . 1 . 5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
1 . 1 . 6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	12.316.500,00	12.316.500,00
1 . 1 . 7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
1 . 1 . 9	Piutang Lainnya	0,00	0,00
1 . 1 . 10	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
1 . 1 . 11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
1 . 1 . 12	Persediaan	2.185.034,00	2.185.034,00
1 . 1 . 13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	14.501.534,00	14.501.534,00
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG		
1 . 2 . 1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
1 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1 . 3	ASET TETAP		
1 . 3 . 1	Tanah	0,00	0,00
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin	4.917.971.867,50	4.917.971.867,50
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan	1.765.416.857,34	1.765.416.857,34
1 . 3 . 4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.057.000,00	67.057.000,00
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1 . 3 . 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan	(4.542.232.522,66)	(4.542.232.522,66)
	JUMLAH ASET TETAP	2.208.213.202,18	2.208.213.202,18
1 . 4	DANA CADANGAN		
1 . 4 . 1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1 . 5	ASET LAINNYA		
1 . 5 . 1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
1 . 5 . 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1 . 5 . 3	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1 . 5 . 4	Aset Lain-lain	233.847.101,50	233.847.101,50
1 . 5 . 5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1 . 5 . 6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(217.584.101,50)	(217.584.101,50)
	JUMLAH ASET LAINNYA	16.263.000,00	16.263.000,00
	JUMLAH ASET	2.238.977.736,18	2.238.977.736,18
2	KEWAJIBAN		
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	0,00	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Utang Belanja	8.884.804,00	8.884.804,00
2 . 1 . 7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.884.804,00	8.884.804,00
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2 . 2 . 1	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
2 . 2 . 3	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
2 . 2 . 4	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.884.804,00	8.884.804,00
3	EQUITAS		



Urusan Pemerintahan : 4 . 12

Unit Organisasi : 4 . 12 . 01

Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

KD. REK	URAIAN	2022	2021 (Dalam Rupiah)
Urusan Pemerintahan	EKUITAS 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	Ekuitas 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.230.092.932,18	2.230.092.932,18
Sub Unit Organisasi	Ekuitas 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
3 . 1 . 3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS URAIAN	2.230.092.932,18	2.230.092.932,18
EKUITAS AWAL	JUMLAH EKUITAS	2.230.092.932,18	1.508.054.109,61
SURPLUS/DEFISIT-LO		(18.995.356.273,11)	(13.648.474.424,89)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.238.977.736,18	2.238.977.736,18
Koreksi Ekuitas		0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		19.215.662.643,00	0,00
EKUITAS AKHIR		2.450.399.302,07	(12.049.520.225,28)

Jambi, 1 Januari 2022

Pengguna Anggaran

H. MUKTI, SE. ME

NIP. 197011121999031002



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	18.995.356.273,11	13.648.474.424,89	5.346.881.848,22	39,18
8.1.1	Beban Pegawai	7.508.759.433,00	6.821.433.243,00	687.326.190,00	10,08
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	6.265.959.694,00	4.487.770.723,00	1.778.188.971,00	39,62
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	5.096.229.000,00	2.104.770.000,00	2.991.459.000,00	142,13
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	106.738.010,33	199.160.187,33	(92.422.177,00)	(46,41)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.831.923,28	33.663.846,56	(16.831.923,28)	(50,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	838.212,50	1.676.425,00	(838.212,50)	(50,00)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 4 . 12 . 01 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(18.995.356.273,11)	(13.648.474.424,89)	(5.346.881.848,22)	39,18
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(18.995.356.273,11)	(13.648.474.424,89)	(5.346.881.848,22)	39,18
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.995.356.273,11)	(13.648.474.424,89)	(5.346.881.848,22)	39,18

Jambi, 1 Januari 2022
Pengguna Anggaran

H. MUKTI, SE. ME

 NIP. 197011121999031002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pengakuan, pengukuran, pengklasifikasian dalam setiap transaksi yang terjadi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi agar Laporan Keuangan ini dapat dimengerti dan memperoleh penafsiran yang sama.

1.1.2. Tujuan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan SKPD adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana.
- b. Menyajikan data realisasi anggaran dalam tahun 2022.
- c. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

1. UUD 1945, Khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara.
2. UU. Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3. **Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

2) Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset (kekayaan), hutang (kewajiban) dan ekuitas dana dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) Laporan Operasional

Menyajikan Iktisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro.

Kekayaan Indonesia (sumber daya alam dan sumber daya manusia) saat ini belum optimal dimanfaatkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia antara lain kemiskinan dan kekerasan, dikarenakan pembangunan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Pancasila belum tuntas dan belum menjadi prioritas.

Era Orde Reformasi saat ini (kajian Lemhanas) pemahaman dan penghayatan akan wawasan kebangsaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila terutama untuk generasi muda cenderung menurun. Penetrasi budaya global yang cenderung sekuler, materialistik, individualistik, konsumtif cenderung lebih dominan mewarnai perilaku masyarakat Indonesia. Menurunnya wawasan kebangsaan berakibat menurunnya nasionalisme dan daya saing serta melemahnya karakter. Untuk itu perlu upaya strategis, sistemik, cepat, tepat dan bersama-sama melalui pembangunan wawasan kebangsaan/karakter bangsa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman di daerah.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi “ *mewujudkan kesatuan bangsa dan politik yang kondusif, harmonis, komunikatif dan dinamis dalam rangka menuju Jambi MANTAP.* ”

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sejalan dengan semangat reformasi
- Membina secara efektif nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan kedaulatan rakyat.
- Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan terpercaya.
- Mereposisi diri dari peran regulator menjadi fasilitator, komunikator dan moderator bagi proses demokratisasi.

2.2. Kebijakan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022 berupa laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Keuangan tahun anggaran 2022 mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)

Dalam tahun anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mendapat alokasi dana dalam APBD Provinsi Jambi sebesar Rp. 19.581.188.125,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 6(ENAM) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, keseluruhan kegiatan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2022	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	9.538.293.485,-	
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	713.357.160,-	
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan	5.782.737.400,-	
IV	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	921.000.000,-	
V	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	636.000.080,-	
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.989.800.000,-	

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing – masing kegiatan. Kendatipun untuk indikator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan sebagainya, sedangkan indikator outcome belum dapat diukur pada tahun pertama.

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA TAHUN 2022	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	9.538.293.485,-	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	251.210.060,-	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.200.000,-	1 Tahun
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	167.010.060,-	1 Tahun
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	7.768.276.223,-	
1.	penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.497.812.856,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	270.463.367,-	1 Tahun
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.656.000,-	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.656.000,-	1 Tahun
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.444.299,-	
1.	Penyed komponen instalasi	175.804.236,-	1 Tahun

	listrik/penerangan bangunan kantor		
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	49.550.000,-	1 Tahun
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	42.446.000,-	1 Tahun
4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.081.496,-	1 Tahun
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.562.567,-	1 Tahun
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.214.073,-	
1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.214.073,-	1 Tahun
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.578.830,-	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat.	5.400.000,-	1 Tahun
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	119.335.264,-	1 Tahun
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.843.566,-	1 Tahun
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	574.914.000,-	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.880.000,-	1 Tahun
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.800.000,-	1 Tahun
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	266.234.000,-	1 Tahun
II.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	713.357.160,-	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	287.365.000,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	425.992.160,-	1 Tahun
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.782.737.400,-	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.782.737.400,-	
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5.272.969.880,-	1 Tahun

2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	446.495.340,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	63.272.180,-	1 Tahun
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	921.000.000,-	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	921.000.000,-	
1.	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	137.150.000,-	1 Tahun
2.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	668.650.000,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	115.200.000,-	1 Tahun

V.	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	<p>636.000.080,-</p> <p>636.000.080,-</p>	
1.	<p>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>90.000.000,-</p>	<p>1 Tahun</p>
2.	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>506.000.000,-</p>	<p>1 Tahun</p>
3.	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	<p>40.000.080,-</p>	<p>1 Tahun</p>
VI.	<p>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>1.989.800.000,-</p> <p>1.989.800.000,-</p>	
1.	<p>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,</p>	<p>500.000.000,-</p>	<p>1 Tahun</p>

	serta Penanganan Konflik di Daerah		
2.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	203.300.000,-	1 Tahun
3.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	286.500.000,-	1 Tahun
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.000.000.000,-	

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dari pengertian diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi adalah sebagai entitas akuntansi, hanya menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang diguna dalam laporan keuangan SKPD adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan Realisasi Anggaran basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima dari rekening kas umum daerah. Dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Penyusunan pos – pos laporan keuangan SKPD (asset, kewajiban dan ekuitas dana) didasari nilai perolehan histori, yaitu asset dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih asset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Secara umum standar akuntansi pemerintah telah diterapkan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, terutama proses akuntansi yang dimulai dari jurnal, buku besar dan Neraca baik untuk penatausahaan pendapatan maupun penatausahaan pengeluaran, karena untuk tahun anggaran 2022 ini semua proses akuntansi diselenggarakan dengan program aplikasi SIMDA.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Rincian dan Penjelasan masing masing Pos – pos Pelaporan Keuangan SKPD .

5.1.1. Pendapatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki sumber pendapatan.

5.1.2. Belanja

Jumlah belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.581.188.125,- (Sembilan belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) terdiri dari 6 Program 32 kegiatan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 realisasi belanja keseluruhan sebesar Rp. 19.211.662.651,-(98,11 %)

5.1.3. Asset

Jumlah aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.204.854.455.43 terdiri dari:

Asset Lancar :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 Nihil
- b. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 Nihil
- c. Saldo investasi jangka pendek juga nihil
- d. Piutang Nihil
- e. Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.797.500,00 yang terdiri dari Persediaan Alat kantor pakai habis

Asset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.097.345.244,84

Aset tetap terdiri dari

Peralatan dan Mesin Rp. 5.041.183.367,50,-

Terdiri dari:

- Alat-alat angkutan sebesar Rp. 3.109.507.000,-
- Alat-alat kantor dan rumah tangga Rp. 1.740.673.367,50
- Alat-alat Studio dan komunikasi Rp. 158.403.000,-
- Alat-alat Keamanan Rp. 30.000.000,-

Gedung dan Bangunan Rp. 919.724.000,-

Merupakan Bangunan Gedung Rp. 1.840.192.857,34,-

Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 67.057.000,-

Merupakan Instalasi Rp. 215.969.050,00,-

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 ada tambahan aset sebesar Rp. 346.899.550,-. Disebabkan adanya pengadaan aset sebagai berikut :

1. Peralatan Kantor Rp. 123.211.500,-
2. Gedung dan bangunan Rp. 74.776.000,-
3. Instalasi Listrik Rp. 148.912,050 ,-

Sedangkan Akumulasi penyusutan Rp.(4.792.053.866,67)

Aset Lainnya

Aset lainnya yang merupakan barang rusak berat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 246.163.601,50

5.1.4. Kewajiban

Sampai dengan posisi 31 Desember 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi tidak memiliki kewajiban kepada pihak lain baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

- a. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) nihil
- b. Uang muka dari kas daerah nihil
- c. Pendapatan diterima dimuka nihil
- d. Utang jangka pendek lainnya Rp. 8.884.806,- terdiri dari :
 - Listrik Rp. 12.683.147,-
 - Air Rp. 1.284.900,-
 - Telepon Rp. 42.516,-
 - Internet Rp. 1.665.000,-

5.1.5. Ekuitas

Sesuai dengan penjelasan dalam bab sebelumnya bahwa asset yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terdiri aset lancar dan aset tetap, maka ekuitasnya terdiri dari ekuitas dana lancar dan ekuitas dalam bentuk investasi.

Ekuitas Dana lancar berjumlah Rp. (8.228.474.00),- terdiri dari :

- a. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp. 8.176.711,00
- b. Cadangan persediaan per 31 Desember 2022 Nihil
- c. Uang muka dari kas daerah nihil

Ekuitas Dana Investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.820.304.809,58,- terdiri dari:

- a. Investasi dalam aset tetap Rp. 1.577.056.010,61
- b. Investasi dalam aset lainnya Rp. 28.579.500,00

Apabila dibandingkan dengan ekuitas dana investasi tahun 2021 sebesar Rp. 1.577.056.010,61 maka terjadi penurunan ekuitas dana investasi

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi berdomisili di Jalan R. M. Nur Atmadibrata nomor 04 Telanaipura Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

Tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut diatas dioperasionalkan dengan berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomr 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2011 tentang Pedoman pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor nomor 12 tahun 2006 tentang Forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2007 tentang Fasilitasi organisasi masyarakat bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2007 tentang Pedoman Pendaftaran organisasi kemasyarkatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman pendidikan wawasan kebangsaan.

BAB VII

PENUTUP

Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2021 yang meliputi 6 program dan 32 kegiatan telah tercapai rata-rata 99,11 % , realisasi keuangan mencapai 99,11 % , ini mengandung makna adanya kesesuaian jadwal dalam pengelolaan keuangan dan semua kegiatan telah mencapai target dengan kriteria "Berhasil".

Oleh sebab itu kedepan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi akan senantiasa berupaya agar efisiensi keuangan dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai produktivitas yang optimal, Amin.

Jambi, Januari 2023

KEPALA BADAN

H. MUKTI, SE. ME

Pembina Utama Muda

NIP. 197011121999031002